

PARTISIPASI INDONESIA DALAM ASEAN DEFENSE MINISTERS' MEETING PLUS EXPERTS' WORKING GROUP ON MARITIME SECURITY GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI LAUT CHINA SELATAN (STUDI ANCAMAN ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING)

INDONESIA PARTICIPATION IN ASEAN DEFENSE MINISTERS' MEETING PLUS EXPERTS' WORKING GROUP ON MARITIME SECURITY TO MAINTAIN STABILITY IN SOUTH CHINA SEA (A STUDY OF ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING THREAT)

Cindytia Rudianto¹, Yoedhi Swastanto², Harangan Sitorus³

Prodi Diplomasi Pertahanan

Fakultas Strategi Pertahanan

Universitas Pertahanan

(email : cindytiarudianto@gmail.com)

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi Indonesia dalam ADMM-Plus EWG on Maritime Security guna menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan serta strategi penguatan diplomasi Indonesia melalui ADMM-Plus EWG on Maritime Security untuk mengangkat isu IUU Fishing sebagai topik utama. Hal ini dihadapkan dengan adanya indikasi perubahan ancaman IUU Fishing yang semula merupakan ancaman non-tradisional, jika tidak segera ditangani maka akan berubah menjadi ancaman tradisional. Perlu upaya konkret untuk membahas isu ini secara mendalam karena juga memiliki korelasi dengan dimensi pertahanan yang secara langsung akan mendestabilisasi kawasan. Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan teori ilmu pertahanan, strategi, partisipasi, komunikasi, *regional security complex* serta konsep diplomasi pertahanan, kerja sama pertahanan dan IUU Fishing dalam keamanan maritim. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat bentuk partisipasi, *participation in implementation* dan *participation in benefits* telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan *participation in decision-making* dan *participation in evaluation* belum dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu, diharapkan terdapat solusi untuk meningkatkan dua indikator tersebut sehingga Indonesia dapat melaksanakan partisipasi dengan maksimal. Kemudian strategi penguatan diplomasi Indonesia untuk memasukkan IUU Fishing sebagai topik utama dijabarkan melalui formulasi *ends + means + way* menjadi langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada *stakeholders* terkait serta menjadi bahan pertimbangan langkah-langkah selanjutnya

Kata kunci: Partisipasi, ADMM-Plus *Expert Working Group on Maritime Security*, IUU Fishing, Diplomasi Pertahanan, Strategi

¹ Cindytia Rudianto, S. Pd., M.Han adalah Mahasiswa Universitas Pertahanan 2017 Fakultas Strategi Pertahanan, Prodi Diplomasi Pertahanan

² Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.BA adalah dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan. Pembimbing 1

³ Brigjen TNI (Purn) Dr. Harangan Sitorus, S.I.P.,M.Sc., M.Si (Han) adalah dosen Strategi Pertahanan Darat di Universitas Pertahanan. Pembimbing 2

Abstract – This study aims to analyze Indonesia's participation in the ADMM-Plus EWG on Maritime Security in order to maintain security stability in the South China Sea along with strategies for strengthening Indonesian diplomacy through the ADMM-Plus EWG on Maritime Security to raise the issues of IUU Fishing as the main topic. An indications of the change in the IUU Fishing threat which was a non-traditional threat will turns into a traditional threat if not addressed immediately. There needs to be concrete efforts to discuss this issue carefully because it also affects the defense dimensions which will directly destabilize the region. In analyzing data, theories of defense science, strategy, participation, communication, regional security complex and also defense diplomacy concept, defense cooperation and IUU Fishing in maritime security are used. This study uses quasi qualitative with descriptive analysis approach. The results of the study show that the four forms of participation, participation in implementation and participation in benefits have been well implemented. Whereas participation in decision-making and participation in evaluation has not been carried out maximally. Therefore, it is expected that there should be solution to improve these two indicators so Indonesia can carry out maximum participation. Next, the strategy of strengthening Indonesian diplomacy to include IUU Fishing as the main topic described through ends formulations + means + way can be used as a reference. In the end, this research is expected to be able to provide benefits and input to relevant stakeholders and become the material for consideration of the next action.

Keywords: Participation, ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security, IUU Fishing, Defense Diplomacy, Strategy

Pendahuluan

Pada hakikatnya, negara di belahan dunia manapun akan selalu berusaha untuk mencapai kepentingan nasional dan melindungi keamanan nasionalnya masing-masing. Jika suatu negara memiliki keamanan yang baik, tentunya akan mendukung pencapaian kepentingan nasional negara tersebut dimana salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengembangkan kerja sama regional.

ASEAN merupakan salah satu kerja sama regional di Asia Tenggara yang awal mulanya hanya difokuskan pada bidang ekonomi, politik, sosial,

budaya sedangkan kerja sama di bidang pertahanan tidak begitu diutamakan. Namun, melihat urgensi nyata akan kebutuhan di bidang pertahanan, Indonesia kemudian menginisiasikan untuk membentuk ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) yakni pertemuan yang membahas mengenai pertahanan pada tingkat Menteri Pertahanan. Selanjutnya pada tahun 2010, ASEAN sepakat untuk mewujudkan ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) yang bersifat *outward looking* bersama negara-negara ekstra kawasan diantaranya: Amerika Serikat,

China, Rusia, India, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

ADMM dan ADMM-Plus sangat jelas menginginkan suatu realisasi nyata dengan menekankan pada kerja sama praktis melalui *Expert Working Group* (EWG) yang terdiri dalam 7 bidang khusus: *Counter-terrorism, Humanitarian Assistance and Disaster Management, Peacekeeping Operations, Military Medicine, Humanitarian Mine Action, Maritime Security*, serta *Cyber Security*.⁴ Ketujuh EWG ini hanya akan membahas seluruh permasalahan yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

Sesuai dengan namanya, ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* hadir untuk memperdalam inisiatif yang lebih efektif dan spesifik dalam menghadapi tantangan maritim melalui bingkai kerja sama praktis. Salah satu contoh tantangan keamanan maritim seperti permasalahan keamanan transnasional sejatinya tidak dapat diatasi suatu negara sendiri. ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* sangat membantu dalam penanganan akan hal-hal tersebut baik dalam hal pertukaran informasi intelijen, latihan bersama, serta *feedback* maupun

masukannya setelah pelaksanaan *Table Top Exercise* (TTX) dan *Field Training Exercise* (FTX).

Diantara banyak macam mengenai keamanan maritim, *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* merupakan urgensi utama yang harus segera ditangani karena masalah ini masih signifikan khususnya di kawasan Asia Tenggara. Pencurian ikan secara ilegal di wilayah kedaulatan negara lain tentunya mencederai kedaulatan negara, mengganggu serta mengancam kestabilan hubungan internasional dan keamanan laut. Seperti kejadian yang terjadi di Teluk Thailand, Indonesia di Laut Natuna, Filipina, Malaysia serta di Laut China Selatan.

Laut China Selatan kerap disebut "*The Heart of Southeast Asia*" karena tingginya aktivitas maritim antara lain sebagai *Sea Lane of Trade* (SLOT) dan *Sea Lane of Communications* (SLOCs) bagi kapal-kapal yang lewat di atasnya. Selain itu, perairan ini memiliki potensi kekayaan laut yang sangat melimpah dan menunjukkan bahwa Laut China Selatan merupakan kawasan yang sangat penting bagi perekonomian dan keamanan dunia. Laut China Selatan merupakan salah satu dari lima zona penangkapan ikan paling produktif di

⁴ Setnas ASEAN, *ASEAN Defence Ministers' Meeting*, dalam <http://setnas-asean.id/asean-defence-ministers-meeting-admm>, diakses pada 16 Juli 2018

dunia sehingga peluang kejahatan IUU *Fishing* besar terjadi di wilayah ini.

Mayoritas pelaku pencurian ikan merupakan negara *claimant states* sendiri dimana pelaku utama adalah China yang berpedoman atas *nine-dash line*. Nelayan-nelayan China yang melakukan kegiatan penangkapan ikan (*fishermen*) ini tidak hanya nelayan-nelayan biasa namun juga *Fishing Militia*, salah satu kombatan utama dalam melakukan kampanye ekspansi militer khususnya di wilayah *nine dash line*. Kehadiran *Fishing Militia* diklaim China hanya untuk melakukan latihan dan kontrol di perairan sengketa yang dilengkapi persenjataan lengkap, kapal perikanan (*trawler*), kapal induk (*mother ship*) dan bergerak sesuai arahan *People's Liberation Army* (PLA). Department Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa China menggunakan armada penangkapan ikan dengan pengawalan bersenjata untuk meningkatkan klaim maritim di wilayah yang disengketakan, hal ini menunjukkan adanya perluasan kekuatan militer dan paramiliter China yang dan digunakan dengan cara yang provokatif dan berpotensi mendestabilisasi kawasan.⁵

⁵ Channel News Asia, *China Using Fishing Fleets to Expand Maritime Claims: US Official*, dalam <http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacif>

Fishing Militia China sering terlibat insiden dengan negara-negara lain, salah satunya adalah fenomena IUU *Fishing* tahun 2016 di wilayah Natuna yang melibatkan Kapal Ikan China, *Coast Guard* China dan Kapal Pengawas Perikanan RI. Pihak China merasa bahwa perairan Natuna masuk ke dalam *nine-dash line* mereka (*overlapping* wilayah) sehingga mereka bebas melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Selain itu, China kerap melakukan tindakan intimidasi, provokasi dengan menodongkan senjata dan menabrakkan kapal.

Pada pertengahan 2017 kembali terjadi insiden pelanggaran penangkapan ikan yang dilakukan oleh 3 kapal Vietnam di wilayah perairan Natuna dimana terjadi saling *shadowing* dan klaim antara kapal *coast guard* Vietnam dengan KRI yang sedang melaksanakan patroli di ZEE Indonesia.⁶ Kondisi-kondisi tersebut menjadi tantangan pada hubungan Indonesia dengan negara-negara kawasan dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang muncul,

ic/china-using-fishing/2894786.html, diakses pada 8 November 2018

⁶ Rojes Saragih, *Dibayangi Coast Guard Vietnam, KRI Fatahillah Tangkap Kapal Ikan Vietnam*, dalam <https://jakartagreater.com/dibayangi-coast-guard-vietnam-kri-fatahillah-tangkap-kapal-ikan-vietnam/>, diakses tanggal 4 Agustus 2018

khususnya ancaman pada domain maritim.

Insiden-insiden yang disebabkan oleh IUU *Fishing* sangat merugikan Indonesia dan membuktikan adanya ancaman potensial sumber daya laut serta ancaman terhadap pertahanan dan keamanan yang tentunya akan mengganggu stabilitas kawasan, terlebih lagi pelaku merupakan negara anggota ADMM-Plus. Fenomena IUU *Fishing* juga akan berkaitan dengan program yang dicanangkan Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), karena pada dasarnya membangun dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak akan terlepas dari suatu kondisi keamanan maritim di tingkat nasional maupun regional yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan nasional.

Dalam forum multilateral, isu IUU *Fishing* sendiri telah banyak masuk menjadi bahasan seperti pada forum ASEAN *Regional Forum* (ARF), ASEAN *Maritime Forum* (AMF), *International Maritime Forum* (IMF) dan telah banyak menghasilkan pernyataan kerja sama guna menangani isu IUU *Fishing*. Meskipun demikian, isu ini belum diangkat dalam tataran forum ADMM-

Plus khususnya pada EWG on *Maritime Security* sebagai pelaksana langsung kerja sama untuk menangani hal-hal terkait ancaman keamanan maritim.

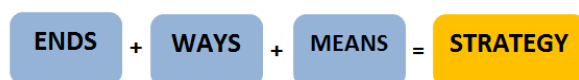
Indonesia sebagai negara maritim telah menetapkan isu IUU *Fishing* sebagai salah satu prioritas nasional yang dituangkan dalam nawacita. Berbagai kegiatan serta upaya peningkatan pemberantasan IUU *Fishing* terus dilakukan seperti halnya memanfaatkan forum-forum kerja sama regional dan internasional termasuk ASEAN yang merupakan soko guru kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia memiliki posisi diplomasi kuat untuk membangun jalur komunikasi antar negara besar di kawasan sebagai bagian dalam membangun poros stabilitas dan perdamaian. Indonesia dapat menggunakan partisipasinya dalam ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* untuk mengupayakan dipilihnya IUU *Fishing* sebagai topik utama pada forum tersebut.

Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana partisipasi Indonesia dalam ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* guna menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan serta strategi penguatan diplomasi Indonesia untuk mengangkat isu IUU

Fishing sebagai topik utama dalam forum.

Dalam menganalisis tentang partisipasi, digunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff⁷ untuk menjelaskan partisipasi Indonesia dalam ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* guna menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan, termasuk partisipasi Indonesia dalam menangani ancaman IUU *Fishing*. Partisipasi Indonesia dilihat dari proses yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama tersebut mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, maupun evaluasi.

Teori strategi menurut Arthur Lykke terdiri dari tiga unsur yakni *ends* atau sasaran yang ingin dicapai, *ways* atau cara melakukannya dan *means* atau sumber daya yang dijabarkan dalam gambar berikut.⁸



Gambar 1. Strategy Formula by Col. Arthur Lykke

Sumber: Arthur F. Lykke Jr., *Defining Military Strategy* dalam *Military Review* No 77 Vol.1, 2018

⁷ John Cohen dan Norman Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*, (New York: Ithaca, 1977), hlm. 229.

⁸ Arthur F. Lykke Jr., *Defining Military Strategy* dalam *Military Review* No 77 Vol.1, 2018

Digunakan untuk menganalisis strategi yang dijalankan Indonesia khususnya untuk memperkuat diplomasi dan keterkaitannya sebagai alat untuk menjaga stabilitas kawasan dari ancaman IUU *Fishing*.

Teori *regional security complex* Barry Buzan⁹ digunakan untuk meninjau stabilitas keamanan di Laut China Selatan sesuai dengan tipe-tipe kompleksitas keamanan kawasan yang ada dalam teori ini. Mengingat keamanan kawasan tidak dapat dipisahkan tanpa memahami pola hubungan saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara di kawasan yang masih terdapat kompleksitas.

Konsep diplomasi pertahanan Cottey dan Foster¹⁰ digunakan untuk membahas tentang bagaimana bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan stabilitas kawasan di Laut China Selatan melalui forum ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* khususnya pada strategi penguatan diplomasi Indonesia dalam memasukkan isu IUU *Fishing* sebagai

⁹ Buzan, Barry dan Ole Wæver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. U.K : Cambridge University Press, hlm. 63.

¹⁰ Andrew Cottey and Anthony Foster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Routledge, 2004), hlm. 6.

salah satu topik utama dalam kegiatan tersebut. Hal ini tentunya akan menunjukkan bagaimana Indonesia melakukan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara.

Konsep IUU *Fishing* dalam keamanan maritim oleh *Food and Agriculture Organizations*¹¹ digunakan untuk mengetahui definisi rigid mengenai ancaman IUU *Fishing* serta menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka menanganani ancaman-ancaman keamanan maritim terkait dengan partisipasinya dalam kerja sama keamanan maritim dengan bentuk latihan bersama, maupun patroli di kawasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuasi-kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kuasi memiliki makna bahwa suatu penelitian digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali atau berdasarkan teori maupun konsep yang telah disusun sebelumnya, tetapi tidak sepenuhnya dapat mengontrol variabel-variabel luar

yang akan mempengaruhi pelaksanaan penelitian.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dimana peneliti berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan maupun menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.

Metode deskriptif kualitatif dipilih berlandaskan keinginan peneliti untuk mendeskripsikan partisipasi Indonesia dalam ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan serta menganalisis strategi penguatan diplomasi Indonesia untuk mengangkat isu IUU *Fishing* sebagai sebagai topik utama. Penulisan penelitian kualitatif ini akan difokuskan pada penggunaan sumber data primer berupa *in depth interview* dan data sekunder berupa studi pustaka.

Untuk menganalisis data, digunakan teori Miles dan Huberman dimana seluruh sumber data baik data

¹¹ <http://www.fao.org/iuu-fishing/en/>, diakses pada 4 Oktober 2018

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 107

primer maupun sekunder dikumpulkan menjadi satu kemudian dilakukan kondensasi data, yang mana data-data tersebut dipilih, dipusatkan, disederhanakan, diringkas serta dilakukan transformasi data. Kemudian data disajikan secara sistematis dan terstruktur hingga memasuki tahap akhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan.¹³

Pembahasan

Partisipasi Indonesia dalam ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security Guna Menjaga Stabilitas Keamanan di Laut China Selatan

Untuk menganalisa partisipasi Indonesia dalam ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security, peneliti menggunakan teori partisipasi yang di deskripsikan oleh Uphoff yaitu *participation in decision-making*, *participation in implementation*, *participation in benefits*, dan *participation in evaluation*.

Aspek-aspek dalam partisipasi ini juga memiliki relevansi dengan dua aspek diplomasi pertahanan yakni *Confidence Building Measures (CBM)* dan *Capacity Building*. Maka, jika keempat tahapan partisipasi ini berhasil dijalankan dengan

baik dan konsisten, akan berdampak pula pada terwujudnya stabilitas keamanan di Laut China Selatan maupun meminimalisir eskalasi konflik yang mungkin muncul.

Participation in decision-making

Dalam pengertiannya, partisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya kerja sama akan dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya menentukan masalah, mengumpulkan dan menganalisa data yang relevan, mengembangkan alternatif-alternatif, memilih alternatif terbaik, menerapkan alternatif yang dipilih.

Penentuan masalah ditunjukkan dengan dilaksananya komunikasi intensif antara Indonesia dengan seluruh negara anggota ADMM-Plus EWG on Maritime Security untuk memutuskan suatu kegiatan dalam mengatasi permasalahan. Permasalahan yang diangkat tentunya permasalahan mengenai keamanan maritim dalam lingkup transnasional yang sifatnya mendesak maupun sedang menjadi *trending topic* di kawasan maupun global.

Salah satu usulan yang diajukan oleh Indonesia dalam ADMM-Plus EWG on Maritime Security yakni untuk diadakannya kegiatan lanjutan dalam

¹³ Miles, M.B., Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. (USA: Sage Publications), hlm 377.

bingkai kerja sama pertahanan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk latihan bersama *Table Top Exercise* (TTX) pada tahun 2012 untuk mendorong negara-negara anggota agar bertukar pikiran, ide, pengalaman serta membangun rasa saling percaya dalam pembahasan mengenai isu-isu keamanan maritim. Pada tahapan ini juga ditentukan suatu skenario untuk menggunakan masukan-masukan tersebut pada tahap berikutnya yakni *Field Training Exercise* (FTX) di tahun berikutnya dan merupakan latihan yang bersifat non perang.

Pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan akan memiliki peran penting bagi Indonesia dalam menyuarakan kepentingan nasional maupun kepentingan regional, serta untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Poros Maritim Dunia. Upaya membangun dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak akan terlepas dari suatu kondisi keamanan maritim di tingkat nasional maupun regional yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan nasional. Akan tetapi, salah satu permasalahan keamanan maritim yakni ancaman IUU *Fishing* masih belum diangkat menjadi agenda maupun topik utama dalam tataran *Expert Working Group*.

Participation in implementation

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan partisipasi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, administrasi, teknis, koordinasi, dan penjabaran program.¹⁴

Indonesia sadar betul perannya sebagai partisipan aktif yang ditunjukkan dengan selalu mengirimkan delegasi di setiap pertemuan dan latihan bersama baik berupa personil, perwira, maupun kapal. Partisipasi aktif Indonesia dengan mengirimkan para ahli di bidang maritim untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan terkait keamanan maritim serta cara menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat diimplementasikan di Indonesia dan kawasan, khususnya Laut China Selatan.

Jika melihat tujuan awal ADMM-Plus *Expert Working Group on Maritime Security* hanya memfokuskan pada upaya membantu ADMM-Plus dalam melaksanakan keputusan terkait keamanan maritim serta merekomendasikan tahapan-tahapan spesifik untuk melakukan kerjasama keamanan maritim. Forum ini membahas mengenai permasalahan Laut China Selatan, namun tidak diulas secara

¹⁴ John Cohen dan Norman Uphoff, *loc.cit.*

mendetail dan rinci.¹⁵ Terlebih lagi kawasan ini terkenal dengan kompleksitasnya yang sarat akan eskalasi konflik.

Menurut Buzan, kompleksitas di kawasan merupakan rasa yang tidak aman yang diciptakan oleh ancaman negara-negara sekitar. Pandangan Buzan sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi di Laut China Selatan dimana belum tuntasnya perselisihan mengenai *overlapping* wilayah dan permasalahan-permasalahan terkait sumber daya alam. Maka untuk menganalisisnya digunakan kerangka analisis Buzan yakni *regional security complex*.

Bentuk *regional security complex* menunjukkan adanya pola persaingan, perimbangan kekuatan dan pola aliansi antara kekuatan utama dalam regional. Karakteristik Laut China Selatan juga cenderung mengarah pada tipe *supercomplex* ditunjukkan dengan munculnya dinamika yang terjadi akibat adanya *spillover* kekuatan besar dunia pada kawasan yakni kekuatan Amerika dengan pedoman FONOP dan China

dengan menghadirkan kekuatannya selama 24 jam di Laut China Selatan.

Merujuk kembali pada hasil-hasil kegiatan di ADMM-Plus *Expert Working Group on Maritime Security*, secara tidak langsung akan berimplikasi pada stabilitas keamanan di Laut China Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan terlibatnya negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan seperti China, Amerika Serikat, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam dalam forum.

Pada dasarnya, permasalahan mengenai Laut China Selatan tidak semata-mata mengenai sengketa wilayah, ancaman akan keamanan maritim seperti masifnya eksploitasi sumber daya alam khususnya yang dikategorikan sebagai IUU *Fishing* juga marak terjadi di wilayah tersebut. Meskipun merupakan Laut bebas (*high sea*) dimana semua orang dapat memanfaatkannya, namun tindakan negara-negara pelaku pencuri ikan terkesan memonopoli sumber daya alam dan tidak mematuhi hukum laut internasional dengan tetap melakukan tindakan militer serta membangun pangkalan militer di atasnya. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan yang akan berdampak pada domain pertahanan dan

¹⁵ Wawancara dengan Tyas Maladinatania. (2018, Agustus 8). (C. Rudianto, Pewawancara) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta Pusat. Derah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.2018

menyebabkan instabilitas kawasan. Fenomena ini ditunjukkan dengan banyaknya kapal ikan asing (KIA) yang memperluas wilayah penangkapan ikannya hingga ke ZEE Indonesia dengan berpedoman pada *traditional fishing ground* serta mendapat perlindungan dari masing-masing *Coast Guard* negara pencuri ikan untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Disini terlihat jelas bahwa kawasan Laut China Selatan menghadapi tantangan berat terkait keamanan maritim (*maritime security*).

Adapun salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan khususnya pada domain maritim adalah dengan melaksanakan *maritime exercise* melalui ADMM-Plus EWG on *Maritime Security*. Dengan dilaksanakannya latihan ini, Indonesia bersama negara-negara anggota lain akan memberikan pemahaman bahwa stabilitas keamanan merupakan suatu *common interest* termasuk terjaminnya kawasan Laut China Selatan tanpa gangguan dari ancaman-ancaman transnasional yang kemudian diimplementasikan pada wilayah maritim masing-masing negara baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

Participation in benefits

Ikut berpartisipasi dalam pengambilan manfaat disini memiliki pengertian bahwa negara dapat mengambil manfaat terhadap suatu program yang telah berlangsung.¹⁶ Pemanfaatan ini tidak ditinjau dari aspek material, melainkan manfaat yang dapat diambil oleh partisipan khususnya untuk mencapai kepentingan nasional negara. Pada kasus ini, pengambilan manfaat erat kaitannya dengan dua aspek diplomasi pertahanan yakni meningkatnya *Confidence Building Measures* (CBM) dan *Capacity Building*.

A. Pencapaian *Confidence Building Measures* (CBM)

Salah satu tujuan dilaksanakannya diplomasi pertahanan adalah guna mencapai *Confidence Building Measures* (CBM) atau rasa saling percaya. Membangun kepercayaan merupakan kunci utama dari upaya mewujudkan kerjasama yang efektif. Menurut Idil Syawfi, terdapat sembilan bentuk pencapaian CBM dan Indonesia telah mencapai lima bentuk CBM dalam partisipasi aktifnya di ADMM-Plus *Expert Working Group on Maritime Security* diantaranya:

1. Dialog dan konsultasi

¹⁶ John Cohen dan Norman Uphoff, *loc.cit.*

Dialog dan konsultasi dilakukan Indonesia dengan negara-negara anggota dalam keseluruhan kegiatan hingga dicapai suatu kesepakatan akhir. Pelaksanaan dialog yang secara rutin dilakukan dengan lokasi pertemuan secara bergantian di negara Host yang merupakan negara ASEAN dan negara Co-Host yang merupakan negara ekstra menunjukkan bahwa ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security memiliki mekanisme terstruktur untuk membangun komunikasi diantara negara-negara anggota.

Dialog dan konsultasi terjadi mulai dari awal kegiatan hingga berakhirnya kegiatan dan evaluasi kegiatan. Dialog dan konsultasi juga ditunjukkan pada saat diskusi-diskusi topik dan pembahasan.

Dilaksanakannya dialog dan konsultasi secara rutin menunjukkan adanya proses komunikasi yang aktif dan turut berkontribusi dalam meningkatkan CBM.

2. Tukar menukar informasi strategis

Informasi yang diberikan mayoritas informasi terkait kondisi keamanan terkini, informasi mengenai praktik-praktik kejahatan transnasional

serta bagaimana negara dapat melakukan upaya penanggulangan.

Kesepakatan yang terbentuk terkait tukar menukar informasi strategis diwujudkan dengan terbentuknya ADMM-Plus *Expert Working Group on Maritime Security Community Information-Sharing Portal* (AMSCIP) untuk berbagi informasi mengenai keamanan maritim khususnya untuk Kepala Staf Angkatan Laut yang dinilai efektif. Selain itu, terbentuk pula kesepakatan ADMM *Direct Communication Link* (DCL) yang sekarang telah berganti nama menjadi ASEAN *Direct Communication Infrastructure* (ADI) yang merupakan jalur komunikasi cepat (hotline) antar Menteri Pertahanan ASEAN untuk merespon situasi darurat yang terjadi di laut untuk meminimalisir adanya misinterpretasi dan eskalasi antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi meningkat sejalan dengan dilakukannya dialog, konsultasi, serta tukar menukar informasi strategis secara rutin.

3. Kerja sama strategis

Kerja sama strategis yang berhasil dicapai adalah kesepakatan kerjasama PASSEX (*Passing Exercise*), merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua

Angkatan Laut untuk memastikan bahwa Angkatan Laut mampu berkomunikasi dan bekerjasama pada saat perang maupun pelaksanaan bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya adalah AMSCIP, ADI dan baru-baru ini adalah CUES yang diadopsi di 4th *Western Pacific Naval Symposium* sebagai tata perilaku jika terjadi *encounters* antara kapal-kapal anggota ADMM-Plus di suatu perairan yang akan diaplikasikan pada ADMM-Plus EWG on *Maritime Security*.

4. Kesepakatan menjalin hubungan baik

Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia menganut kebijakan politik Indonesia yang bebas dan aktif. Hubungan baik ditunjukkan Indonesia terhadap negara-negara anggota yang berseteru di Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia juga tidak memihak pada salah satu kubu yang sedang berseteru dalam memperluas hegemoninya di kawasan. Indonesia memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral dalam kawasan.

Upaya Indonesia ditunjukkan dengan mengajak seluruh anggota untuk andil dalam penjagaan kawasan tersebut secara kolektif dimana kawasan tersebut merupakan *centre of*

gravity dengan tingginya aktifitas maritim di atasnya serta menekankan bahwa pemanfaatan pada kawasan tersebut harus tetap berada pada koridor yang benar sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang berlebihan dan menyebabkan instabilitas kawasan.

Kesepakatan menjalin hubungan baik tidak hanya ditunjukkan dalam konteks ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* saja. Kesepakatan yang lebih dalam juga berhasil diwujudkan Indonesia dengan meningkatkan hubungan yang lebih dalam (*strategic partnership*) secara bilateral. Kerangka kerja sama maupun komitmen-komitmen baru berdasarkan *mutual benefit* berhasil diwujudkan Indonesia bersama negara-negara anggota di luar forum tersebut yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hubungan baik dengan seluruh anggota.

5. Latihan militer bersama untuk tujuan pelatihan

Latihan bersama merupakan salah satu wujud dari kerja sama pertahanan dan dilakukan tidak untuk menghadapi satu negara atau beberapa negara tertentu, namun ditunjukkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan tak terkecuali Laut China Selatan.

Latihan bersama atau *Field Training Exercise* (FTX) berada pada tahapan akhir di tiap periodenya dimana pada tahap ini seluruh negara berpartisipasi dan menjalankan agenda yang telah diskenariokan. Kegiatan dalam latihan bersama ini secara langsung dapat meningkatkan CBM antar negara anggota terutama dalam penanganan ancaman keamanan transnasional pada domain maritim.

Berdasarkan kelima aspek CBM diatas telah menjelaskan bahwa CBM Indonesia dan negara-negara anggota dalam ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* sudah terbangun yang ditunjukkan dengan mekanisme bakunya yang sudah cukup bagus. Kendati demikian, meskipun tingkat tingkat perasaan saling percaya diantara anggota yang saling bekerjasama meningkat dan dapat mengurangi ketegangan terkait Laut China Selatan, masih dijumpai hambatan-hambatan.

Hambatan yang muncul adalah adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Perbedaan kepentingan turut ditunjang oleh prinsip *consensus base* ASEAN, sehingga untuk membahas mengenai permasalahan yang belum mendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota, permasalahan tersebut belum

mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini merupakan celah bagi Indonesia dimana suara dan upayanya diperhitungkan ASEAN untuk mengupayakan strategi diplomasinya dalam menyatukan perbedaan kepentingan. Salah satu caranya adalah meyakinkan negara-negara tersebut melalui forum ini.

B. Pencapaian *Capacity Building*

Capacity Building akan ditekankan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan negara melalui kegiatan latihan bersama yang dilihat dalam aspek pengembangan SDM dan penguatan organisasi.

1. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan profesionalitas personil serta kemampuan teknis melalui *training* maupun praktek di lapangan. Dimensi pengembangan SDM, ditunjukkan dengan bertambah dan meningkatnya kemampuan maupun profesionalitas personil yang dikerahkan untuk mengikuti FTX.

Hal ini didukung oleh kehadiran negara-negara Plus. Negara-negara Plus memiliki kapabilitas militer lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sehingga kekuatan negara Plus ini

menjadi moda yang sangat menguntungkan.

Selain itu, perwujudan suatu kegiatan di lapangan (FTX), dibutuhkan konsep, prosedur, serta taktik yang melibatkan *sharing ideas* antar *expert* sehingga para Angkatan Laut negara-negara Plus akan bertukar pikiran, bertukar informasi, bertukar strategi dalam penyelesaian suatu misi pengamanan keamanan maritim. Secara otomatis kemampuan negara-negara dalam menghadapi tantangan keamanan akan meningkat.

Capaian *Capacity Building* Indonesia menunjukkan bahwa proses yang terjadi mampu merealisasikan tujuan Indonesia. Tujuan tersebut dalam rangka memperkuat kapabilitas dan interoperabilitas TNI serta *stakeholder-stakeholder* terkait untuk mengadopsi taktik dari negara-negara Plus dan diimplementasikan guna mengamankan wilayah Indonesia dan kawasan.

2. Penguatan organisasi

ADMM-Plus EWG *on Maritime Security* secara khusus membahas dan melakukan kerja sama praktis terkait penanganan ancaman keamanan maritim. Fokus yang dimiliki dalam forum ini akan menambah dan melengkapi forum-forum lainnya yang

juga membahas mengenai keamanan maritim seperti ARF ISM, AMF, ReCAAP, dan WPNS. Contoh nyata terdapat pada upaya pemberlakuan CUES di kawasan. CUES merupakan hasil dari WPNS 2014 yang ingin diaplikasikan dalam ADMM-Plus EWG *on Maritime Security* dan di sahkan di ADMM-Plus. Ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi tersebut saling menguatkan dan terkoneksi satu sama lain

Kendati demikian, pengambilan manfaat akan peningkatan kapabilitas ini terkendala oleh koordinasi antar *stakeholder* di dalam negeri. Terlalu luasnya *terms Maritime Security* serta adanya tiga belas *stakeholder* yang menangani kemaritiman menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan bidang keamanan maritim. Terlebih lagi, ancaman akan keamanan maritim yang semakin multidimensi sehingga ancaman tersebut tidak hanya ditangani oleh satu instansi saja, melainkan beberapa instansi yang menyebabkan tumpang tindih dalam hal penanganannya. Mengenai stabilitas keamanan di kawasan, merupakan ranah Kementerian Pertahanan dimana unsur TNI AL dan Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga non-pertahanan memiliki peran di dalamnya. Namun, jika

membahas mengenai IUU *Fishing*, pastinya Kementerian Kelautan dan Bakamla memiliki porsi yang lebih besar. Sehingga dalam kasus IUU *Fishing* di Laut China Selatan ini dibutuhkan koordinasi dari berbagai *stakeholder* dimana permasalahan ini juga merupakan ancaman pertahanan dan kedaulatan negara.

Participation in evaluation

Partisipasi yang terakhir adalah partisipasi dalam hal evaluasi kegiatan terkait dengan pelaksanaan program yang telah diimplementasikan.¹⁷ Indonesia turut berpartisipasi dalam membahas dan mengevaluasi program-program yang telah dan akan dilakukan oleh anggota-anggota ADMM-Plus EWG *on Maritime Security*.

Pembahasan dan evaluasi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut disampaikan dalam tiap pertemuan yang berlangsung secara lanjutan dimana dalam rentang waktu 2011 hingga 2018 telah diadakan selama tiga belas kali.

Walaupun sering dibahas di tiap pertemuan, hingga saat ini Indonesia belum pernah mengajukan isu IUU *Fishing* menjadi salah satu agenda kerjasama yang dapat di kerjasamakan

pada tataran EWG *on Maritime Security*. Hal ini menjadi penuh dilema dikarenakan Indonesia tak henti-hentinya menyuarkan isu tersebut masuk menjadi kejahatan lintas batas dimana banyak aspek yang terkandung di dalamnya termasuk aspek pertahanan dan keamanan.

Upaya Indonesia juga digaungkan pada dunia internasional, namun hingga saat ini masih banyak negara yang kurang sependapat. Bahkan sebagai *focal point* ADMM-Plus *Expert Working Group on Maritime Security*, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri juga belum sependapat terkait masalah tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, Bakamla, serta pakar-pakar maritim yang meyakini bahwa IUU *Fishing* di Laut China Selatan masuk menjadi salah satu permasalahan pertahanan dan keamanan yang butuh perhatian lebih akan ancaman yang dapat muncul kedepan. Jika permasalahan IUU *Fishing* di Laut China Selatan tidak mendapat perhatian lebih, lambat laun juga akan menghancurkan pertahanan dan keamanan Indonesia.¹⁸

¹⁷ John Cohen dan Norman Uphoff, *loc.cit.*

¹⁸ Wawancara dengan Robert Mangindaan. (2018, Oktober 16). (C. Rudianto, Pewawancara) Forum

Maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia memainkan peran konstruktifnya dan mengupayakan strategi diplomasi melalui partisipasinya dalam EWG on Maritime Security untuk mengangkat IUU Fishing sebagai topik utama pada pelaksanaan ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security. Kegiatan dapat dilakukan dengan suatu analisa strategis mengenai strategi yang dapat disusun berdasarkan kepentingan Indonesia.

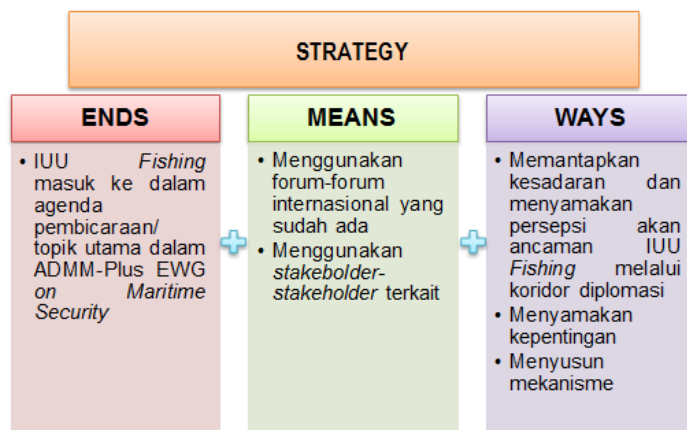
Strategi Penguatan Diplomasi Indonesia Untuk Mengangkat isu IUU Fishing Sebagai Topik Utama dalam ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security

Melihat kondisi yang secara umum menunjukkan gejala yang semakin kompleks dan semakin eskalatif, diperlukan suatu strategi penguatan untuk mengangkat IUU Fishing sebagai topik utama dalam ADMM-Plus EWG on Maritime Security sehingga dapat dibahas secara mendalam dan dikerja-samakan.

Dalam upaya membangun strategi penguatan harus berpedoman pada teori strategi yang dirumuskan oleh Col. Arthur Lykke yakni *Ends + Means+ Ways* dimana unsur diplomasi memiliki

peran yang paling utama. Adapun tahapan pertama yang harus dilakukan antara lain menentukan sasaran yang ingin dicapai, yakni masuknya isu IUU Fishing di Laut China Selatan sebagai topik utama dalam ASEAN Defense Ministers Meeting Plus Expert Working Group on Maritime Security untuk dilakukan penanganan praktis sebagai modalitas untuk mewujudkan stabilitas keamanan (*ends*) dengan menggunakan forum-forum internasional yang sudah ada (*means*), serta memantapkan kesadaran dan menyamakan persepsi melalui koridor diplomasi (*ways*).

Tabel 1. Ends, Ways, Means Strategi Penguatan Diplomasi Indonesia



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Untuk memperjelas mengenai strategi-strategi yang dilakukan Indonesia guna mempekuat diplomasinya terhadap IUU Fishing, akan dianalisis menggunakan formulasi strategi Lykke yang dibagi ke dalam tiga bagian yakni *ends, means* dan *ways*.

A. Ends

Masifnya kejahatan IUU *Fishing* di Laut China Selatan menyebabkan instabilitas dimana negara-negara tidak segan akan melakukan serangan kepada negara lain yang dirasa mengganggu. Hal ini menyebabkan menurunnya rasa saling percaya dan bahkan akan memicu konflik nyata di kemudian hari. Selain itu, Kapal Ikan Asing juga memuat unsur-unsur kejahatan lainnya yang akan menimbulkan dampak negatif dan ancaman bagi negara. Fenomena ini bukan hanya menjadi perhatian negara-negara yang terdampak, namun juga merupakan suatu *concern* bersama untuk segera ditangani secara bersama-sama. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia perlu memperkuat diplomasinya terhadap penanganan kejahatan IUU *Fishing* pada jalur ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* sebagai topik utama yang wajib untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut (*ends*) guna mewujudkan stabilitas keamanan di Laut China Selatan sebagai *outcome*.

Selain itu, juga telah dijabarkan pada pasal 6 kesepakatan DoC serta *framework* CoC yang menyarankan untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan kooperatif terkait keamanan maritim. Kerja sama yang dilakukan murni atas

dasar untuk menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan, tidak pada koridor kegiatan-kegiatan militer, namun lebih mengarah pada kerjasama keamanan dan keselamatan maritim.

Terwujudnya stabilitas di Laut China Selatan merupakan kepentingan ASEAN dan dunia. Indonesia juga memiliki kepentingan akan stabilnya kawasan Laut China Selatan, dimana stabilnya kawasan regional akan berdampak dan memperkuat stabilitas nasional sehingga impian Indonesia untuk mewujudkan visi menjadi Poros Maritim Dunia akan tercapai selaras dengan stabilitas regional. Maka dari itu, untuk mengeksekusi *ends* atau tujuan yang ingin dicapai, maka harus di dukung dengan dua aspek lainnya yakni *means/ sarana* dan *ways/ cara*.

B. Means

Jika melihat upaya Indonesia yang vokal di dunia, Indonesia sangat serius dalam menangani IUU *Fishing*. Terlebih lagi belakangan, Indonesia menerapkan cara koersifnya dengan mengeluarkan kebijakan peneggelaman kapal yang beresiko memancing ketegangan dalam fora politik internasional. Sarana yang digunakan Indonesia yakni melalui pengerahan seluruh lini diplomasinya pada forum-forum internasional

khususnya dalam forum-forum kemaritiman dan pertahanan sebagai wadah untuk untuk menyuarkan permasalahan IUU *Fishing*.

Contoh nyata yang terjadi adalah Indonesia telah menjalin kerja sama yang baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral terkait IUU *Fishing* dengan negara-negara di dunia maupun melaksanakan lokakarya-lokakarya. Selain itu, Indonesia juga berhasil melakukan kerja sama rutin terkait pemberantasan IUU *Fishing* secara bilateral dengan negara-negara ekstra kawasan yakni; Srilanka, Australia, Rusia, Norwegia. Kemudian Indonesia juga menggunakan sarana multilateral sebagai contohnya yakni kerja sama “*Indomalphi*” bersama Filipina dan Malaysia. Platform kerja sama trilateral di Laut Sulu ini diisi dengan kegiatan patroli bersama yang terkoordinasi di laut untuk mencegah IUU *Fishing*, patroli udara, serta ke depan akan ditingkatkan dengan kegiatan patroli bersama di darat. Selanjutnya adalah Patroli Selat Malaka bersama Malaysia dan Singapura dengan nama “*Malsindo*”. Patroli ini melibatkan kolaborasi antar negara dalam menangani permasalahan pembajakan dan perompakan yang pada kala itu

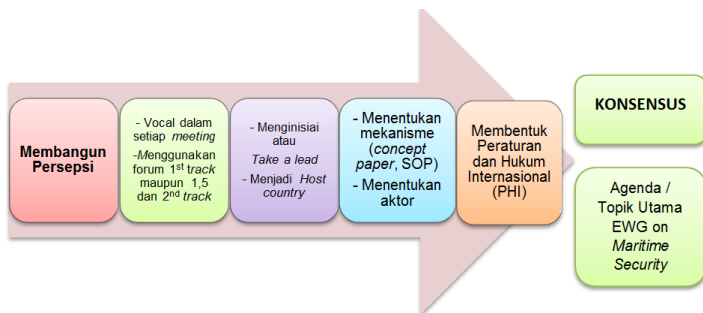
menjadi primadona di Asia Tenggara serta penanganan anti IUU *Fishing* di perairan Selat Malaka. Kerja sama ini mendapat apresiasi dunia karena dapat menekan angka kejahatan di laut.

Kemudian dalam forum-forum Internasional seperti ASEAN *Maritime Forum* (AMF), ASEAN *Regional Forum* (ARF) serta beberapa forum lainnya dimana forum-forum ini digunakan Indonesia untuk membawa IUU *Fishing* ke tingkat regional maupun internasional. Indonesia dapat menggunakan forum-forum yang telah berjalan ini beserta para pemangku kepentingannya sebagai sarana untuk memasukkan maupun mendorong isu IUU *Fishing* pada tataran ADMM-Plus EWG on *Maritime Security*.

C. Ways

Melihat proses yang telah disampaikan sebelumnya, *ways* atau cara menduduki posisi utama untuk melakukan penguatan yakni dengan menekankan pada kegiatan diplomasi.

Penyusunan suatu strategi penguatan harus disusun secermat mungkin dimana penjabaran mengenai cara dalam mencapai tujuan diuraikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Ways dalam mencapai tujuan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

1. **Membangun persepsi**

Upaya membangun persepsi secara global bahwasanya IUU Fishing merupakan TOC atau kejahatan lintas negara terorganisir terus menerus dilakukan Indonesia melalui berbagai *stakeholdernya* untuk merealisasikan perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pembangunan persepsi IUU Fishing juga tidak semata-mata mengenai keinginan diakuinya sebagai TOC saja, namun perlu ditekankan kembali bahwa permasalahan IUU Fishing merupakan permasalahan yang *urgent* dan butuh penanganan segera sehingga ini akan menjadi upaya preventif akan terjadinya *wars over fishing* dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Meningkatnya kehadiran kekuatan bersenjata sebagai pelindung pelaku pencurian ikan menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi serta melegalkan tindakan tersebut. Kondisi ini jika tidak segera mendapat penanganan dan dikontrol secara optimal akan bereskalasi serta berpotensi mengancam stabilitas

kawasan. Ini membuktikan bahwa permasalahan akan keamanan maritim di kawasan tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab satu negara saja karena karakternya yang memiliki kedaulatan ganda, ketidakjelasan tanpa batas, serta permeabilitasnya yang tinggi.¹⁹

Meskipun demikian, upaya pembangunan persepsi yang digaungkan Indonesia secara terus menerus ini masih terkendala dengan kepentingan nasional negara-negara yang belum sepakat untuk merumuskan permasalahan IUU Fishing sebagai salah satu kejahatan yang mengancam pertahanan dan keamanan, mengingat pembangunan persepsi juga harus menekankan pada kesamaan pandang akan kepentingan bersama sehingga tidak akan ada satupun negara yang merasa dirugikan.

2. **Vocal dalam setiap meeting**

Upaya ini dapat diwujudkan dalam menyuarakan isu IUU Fishing pada ketiga dokumen kerja dan politik ASEAN karena isu ini merupakan isu yang penting serta merumuskan hambatan-hambatan apa yang dialami sehingga Indonesia harus konsisten memasukkan elemen-elemen

¹⁹ Anggoro dalam Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Wacana Poltik*, Volume 1 (2), 2016, hlm. 9

tersebut pada dokumen kerjanya. Selain itu, pemanfaatan forum-forum internasional yang sudah ada baik 1st track, 1,5 track maupun 2nd track dapat dimanfaatkan untuk mendorong IUU Fishing untuk terus menerus diangkat dan dibicarakan sehingga didapatkan suatu pemahaman global serta dapat masuk menjadi topik utama dalam EWG on Maritime Security.

3. **Menjadi host country**

Dengan mengambil peran menjadi host country, Indonesia akan mudah merumuskan agenda-agenda apa yang ingin dikerjasamakan dalam EWG on Maritime Security.

4. **Menentukan mekanisme**

Indonesia harus menentukan mekanismenya antara lain menyusun *concept paper* terkait IUU Fishing dan menyampaikannya kepada masing-masing anggota, menyamakan SOP dalam menangani IUU Fishing, membentuk Peraturan dan Hukum Internasional (PHI), menentukan siapa saja yang terlibat dimana hal ini membutuhkan waktu yang panjang.

Setelah proses perumusan strategi ini dilaksanakan dan IUU Fishing menjadi salah satu topik utama yang dibahas, proses selanjutnya adalah

penyerahan proposal pada tingkat lebih tinggi yakni ADSOM-Plus dan berikutnya naik ke tingkat ADMM-Plus yang kemudian menghasilkan suatu keputusan akhir dan dapat diimplementasikan pada tahap EWG yang lebih operasional. Implementasi dapat berupa masuknya isu IUU Fishing untuk dibahas kembali pada pertemuan berikutnya maupun pada periode berikutnya, diperlukan suatu tindak lanjut terhadap IUU Fishing, terbentuknya suatu mekanisme konkret maupun dibentuknya suatu EWG yang khusus untuk membahas IUU Fishing (EWG on IUU Fishing).

Dapat dianalisis bahwa pada bagian ways merupakan perwujudan dari strategi diplomasi secara menyeluruh dan menekankan pada metode-metode diplomatik untuk mewujudkan tujuan (*ends*).²⁰ Upaya-upaya ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan selaku *focal point*, melainkan juga dilakukan oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat baik itu Kementerian Luar Negeri, TNI AL, serta Kementerian dan lembaga yang terlibat sehingga diperlukannya soliditas yang kuat.

²⁰ Ronald Peter Barston, *Modern Diplomacy*, (London: Pearson Education Limited, 2016), hlm. 38-39

Berdasarkan penjabaran akan strategi penguatan diplomasi Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memasukkan isu IUU Fishing sebagai topik utama dalam ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security dapat menggunakan strategi penguatan diplomasi berdasarkan formulasi strategi Lykke *Ends + Means + Ways* untuk menciptakan (*outcome*) stabilitas keamanan di Laut China Selatan agar terbebas dari ancaman IUU Fishing. Selain itu, dibutuhkan pula upaya dan komitmen yang konsisten untuk membangun pemahaman dunia bahwa IUU Fishing merupakan kejahatan yang harus diperangi dan perlunya aturan yang lebih kuat untuk mengatasinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang sudah dijabarkan serta dianalisis, berikut ini adalah kesimpulan penelitian yang disusun ke dalam poin-poin berdasarkan rumusan penelitian;

1. Dalam ADMM-Plus EWG on *Maritime Security*, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ikut berpartisipasi secara aktif dengan melaksanakan empat tahapan partisipasi yaitu *participation in decision-making*, *participation in implementation*,

participation in benefits, dan *participation in evaluation*. Partisipasi yang demikian dapat meningkatkan posisi tawar selaras dengan meningkatnya *trust building* dikarenakan partisipasi aktif Indonesia dalam menginisiasi kerja sama praktis (FTX) pertama pada forum pertahanan multilateral yang menjadi landasan terbentuknya kegiatan-kegiatan lainnya.

Dari keempat partisipasi, dua partisipasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Indonesia yaitu *participation in implementation* dan *participation in benefits*. Dalam *participation in implementation*, Indonesia berhasil mengimplementasikan kerja sama maritim pada ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* bersama negara-negara lainnya terhadap keamanan kawasan yang tentunya memberikan dampak positif pada stabilitas keamanan di Laut China Selatan. Selain itu, melalui ADMM-Plus EWG on *Maritime Security*, Indonesia berhasil menginisiasikan pertemuan ASEAN-China dan berhasil menyelenggarakan *Maritime Exercise* yang menunjukkan keseriusan negara-negara untuk menjaga stabilitas kawasan serta mengurangi tensi di Laut China Selatan. Sedangkan dalam hal *participation in benefits*, Indonesia berhasil mengambil manfaat dengan

mewujudkan dua aspek diplomasi pertahanan yakni CBM dan *Capacity Building* yang ditunjukkan dengan mekanisme bakunya yang sudah cukup bagus. Akan tetapi, masih ada dua partisipasi yang perlu ditingkatkan karena belum optimal adalah *participation in decision-making* dan *participation in evaluation*. Dalam *participation in decision-making* atau pengambilan keputusan, masih ditemui beberapa kendala yaitu Indonesia belum sepenuhnya mampu memposisikan maupun menggiring seluruh negara anggota untuk menyepakati isu IUU Fishing sebagai topik utama untuk dikaji lebih dalam pada ADMM-Plus EWG on *Maritime Security*. Partisipasi terakhir yang perlu ditingkatkan adalah *participation in evaluation*. Dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, Indonesia belum sepenuhnya mampu mengajukan isu IUU Fishing untuk dikerjasamakan dalam tataran kerja sama praktis ADMM-Plus EWG on *Maritime Security*.

2. Upaya strategi penguatan diplomasi Indonesia dijabarkan melalui formulasi strategi Lykke dengan *Ends + Means + Ways*. Tujuan yang ingin diwujudkan telah dijabarkan secara jelas yakni IUU Fishing agar masuk sebagai

agenda pembicaraan atau topik utama dalam ADMM-Plus EWG on *Maritime Security* di dukung dengan penggunaan forum-forum internasional yang sudah ada serta stakeholder-stakeholder terkait sebagai alat atau sarana. Kemudian melakukan diplomasi dan komunikasi sebagai *ways/ cara* dengan:

- a) Membangun persepsi bersama/ menyamakan persepsi akan ancaman IUU Fishing sebagai *concern* bersama.
- b) Mengambil bagian di setiap *meeting/ vocal* di setiap *meeting* dengan menyuarakan isu IUU Fishing pada ketiga dokumen kerja dan politik ASEAN.
- c) Memanfaatkan forum-forum 1st track, 1,5 track maupun 2nd track untuk mendorong IUU Fishing untuk terus menerus diangkat dan dibicarakan sehingga didapatkan suatu pemahaman global.
- d) Mengambil peran sebagai *host country*.
- e) Menentukan mekanisme berupa *concept paper* maupun SOP.
- f) Menentukan aktor yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- g) Membentuk Peraturan Hukum Internasional (PHI).

Rekomendasi

Rekomendasi Teoretis

Jika dilihat secara menyeluruh, penelitian ini dapat dijadikan saran untuk pengembangan ilmu diplomasi pertahanan. Penelitian ini telah membahas mengenai partisipasi yang dilakukan Indonesia dalam forum *ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security* dan telah mengulas mengenai capaian-capaian kerja sama yang berhasil dilakukan. Namun, masih diperlukan penelitian lanjutan yang dapat mengulas lebih dalam mengenai aspek-aspek lain. Disamping itu, untuk menguji teori-teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini juga dapat diaplikasikan pada kasus lain.

Rekomendasi Praktis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia cukup sukses dan banyak mendapatkan manfaat melalui aktifnya partisipasi dalam *ADMM-Plus Expert Working Group on Maritime Security*. Namun, masih terdapat hambatan yang menghalangi Indonesia untuk mencapai hasil yang sempurna terkait keamanan maritim yakni masih banyaknya perbedaan pendapat dan pemahaman akan ancaman *IUU Fishing* sehingga hingga saat ini kejahatan tersebut masih belum masuk sebagai

TOC yang harus diberantas oleh negara-negara di seluruh dunia.

Adapun saran berdasarkan pengembangan strategi penguatan ditujukan kepada pemerintah pusat yang memiliki sumber daya dan sarana untuk dapat;

- a) Saran kepada Pemerintah untuk terus menerus memberi pelatihan terhadap para diplomat agar menguasai segala macam hal mengenai *IUU Fishing* dan aspek-aspek lain yang berkorelasi di dalamnya.
- b) Kepada Kementerian Pertahanan untuk dapat meninjau ulang isu *IUU Fishing* yang akhir-akhir ini turut mengancam pertahanan dan keamanan negara sehingga dapat diupayakan menjadi salah satu topik utama dalam kegiatan *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* dan dilakukan suatu bingkai kerja sama praktis.
- c) Kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri agar mengupayakan Indonesia menjadi ketua/ *Host country* dalam *EWG on Maritime Security*
- d) Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri agar terus membangun kesadaran

global akan bahaya IUU Fishing dengan menggunakan strategi diplomasi kooperatif, komunikasi dan aktif untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggoro dalam Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman. 2016. "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia". *Jurnal Wacana Poltik, Volume 1* (2).
- Barston, Ronald Peter, 2016. *Modern Diplomacy*. London: Pearson Education Limited.
- Buzan, Barry dan Ole Wæver, 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. U.K: Cambridge University Press.
- Channel News Asia. "China Using Fishing Fleets to Expand Maritime Claims: US Official", dalam <http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/china-using-fishing/2894786.html>, diakses pada 8 November 2018.
- Cohen, John dan Norman Uphoff, 1977. *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*. New York: Ithaca.
- Cottey, Andrew and Anthony Foster, 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Routledge.
- Food and Agriculture Organization, dalam <http://www.fao.org/iuu-fishing/en>, diakses pada 4 Oktober 2018.
- Lykke, Arthur F, 1977. "Defining Military Strategy" dalam *Military review* No 77 Vol. 1
- Maladinatania, Tyas. (2018, Agustus 8). (C. Rudianto, Pewawancara) Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta Pusat. Derah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
- Mangindaan, Robert. (2018, Oktober 16). (C. Rudianto, Pewawancara) Forum Kajian Pertahanan Maritim. Jakarta Pusat. Derah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, and Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, USA: Sage Publications.
- Rudianto, Cindytia. Mahasiswa Universitas Pertahanan 2017 Fakultas Strategi Pertahanan, Prodi Diplomasi Pertahanan
- Saragih, Rojas. "Dibayangi Coast Guard Vietnam, KRI Fatahillah Tangkap Kapal Ikan Vietnam", dalam <https://jakartagreater.com/dibayangi-coast-guard-vietnam-kri-fatahillah-tangkap-kapal-ikan-vietnam/>, diakses pada 4 Agustus 2018.
- Setnas ASEAN. ASEAN Defense Ministers Meeting, dalam <http://setnas-asean.id/asean-defence-ministers-meeting-admm>, diakses pada 16 Juli 2018.
- Sitorus, Harangan. Dosen Strategi Pertahanan Darat di Universitas Pertahanan. Pembimbing 2
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swastanto, Yoedhi. Dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan. Pembimbing 1

